

## Strategi Proteksi Ekonomi Pasar Sampang Dalam Menghadapi Monopoli dengan Praktik Kolaborasi

Agus Darwanto <sup>1\*</sup>, Dwi Lestari <sup>2</sup>, and Okti Nurhidayah <sup>3</sup>

<sup>1</sup>International Open University

<sup>2</sup>Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>3</sup>LP3I Purwokerto

### Abstract

Sampang District is the only area in Cilacap Regency where citizens of Chinese descent are not allowed to have their own business to protect native traders from the monopoly of citizens of Chinese descent. The purpose of this study was to determine the trade protection model applied by Sampang residents in dealing with trade monopoly efforts from residents of Chinese descent. The research methodology used is the mix method. Collecting data by conducting surveys, observations, and interviews. The research location is Sampang District. Withdrawal of samples using purposive sampling method by interviewing people who know the trading system that applies in Sampang District. Analysis and processing of data using descriptive analysis. The results of the study show that the non-involvement of citizens of Chinese descent in the Sampang economy has been going on for a long time, namely when Sampang residents tried to protect their territory from the direct involvement of citizens of Chinese descent in economic activities. Sampang residents allow a business collaboration system between residents of Chinese descent and indigenous residents but using the names of indigenous people. With this strategy, the people of Sampang can develop the economy of the indigenous people without being dependent on people of Chinese descent.

**Keywords:** economy; indigenous; protection; Sampang; citizens of Chinese descent

Received: 30 November 2022; Accepted: 28 Desember 2022;

Published: 31 Desember 2022

### To cite this document:

Darwanto, A., Lestari, D., Nurhidayah, O. (2022). Strategi Proteksi Ekonomi Pasar Sampang Dalam Menghadapi Monopoli dengan Praktik Kolaborasi, JDBIM, Vol.1 No.2

\*Corresponding author  
Email: [adarwanto@gmail.com](mailto:adarwanto@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kecamatan Sampang merupakan satu-satunya daerah di Kabupaten Cilacap yang warga keturunan Cina tidak diperkenankan memiliki usaha sendiri untuk melindungi pedagang pribumi dari monopoli warga keturunan Cina. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model proteksi dagang yang diterapkan warga Sampang dalam menghadapi upaya monopoli dagang dari warga keturunan Cina. Metodologi penelitian yang digunakan adalah mix method. Pengumpulan data dengan melakukan survei, observasi dan wawancara. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sampang. Penarikan sample dengan menggunakan metode purposive sampling dengan mewawancarai orang-orang yang mengetahui sistem perdagangan yang berlaku di Kecamatan Sampang. Analisis dan pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterlibatan warga keturunan Cina dalam perekonomian Sampang sudah berjalan sejak tahun 1964, yaitu ketika warga Sampang berupaya memproteksi wilayahnya dari keterlibatan langsung warga keturunan Cina dalam kegiatan perekonomian. Warga Sampang membolehkan sistem kolaborasi bisnis antara warga keturunan Cina dengan warga pribumi namun menggunakan nama warga pribumi. Dengan strategi demikian, warga Sampang mampu mengembangkan perekonomian warga pribumi tanpa ketergantungan terhadap warga keturunan Cina.*

**Kata kunci:** ekonomi; pribumi; proteksi; Sampang; warga keturunan Cina.

### **LATAR BELAKANG**

Sampang merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk keseluruhan di Kecamatan Sampang berdasarkan sensus tahun 2015 adalah 37.797 jiwa yang terdiri dari 19.032 laki-laki dan 18.765 perempuan. Dari sensus tersebut ditemukan data bahwa ada 3 orang penduduk merupakan warga keturunan Cina dan 10 orang penduduk merupakan warga keturunan Arab (Arifin, 2017).

Kecamatan Sampang terkenal sebagai satu-satunya daerah di Kabupaten Cilacap yang seluruh toko, warung dan badan usaha lainnya dikuasai oleh pribumi. Meskipun demikian warga keturunan Cina tetap bisa hidup dengan aman dan damai, tetapi mereka tidak diperkenankan untuk membuka usaha sendiri. Hal ini karena alasan pelarangan tersebut tidak berbau SARA, namun hanya sebagai upaya proteksi ekonomi. Sehingga seandainya ada di antara warga keturunan Cina yang ingin mengembangkan usaha di Kecamatan Sampang, mereka harus menjalin kerja sama dengan penduduk pribumi Sampang, tidak diperkenankan

membuka usaha tersebut atas nama mereka sendiri. Hal ini berdampak positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat pribumi di Kecamatan Sampang (Mujanah dkk, 2014). Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, karena kejadian ini berlangsung sudah sejak lama sehingga menjadi hukum tak tertulis yang telah dijalankan, disepakati dan dilestarikan oleh seluruh warga Kecamatan Sampang hingga sekarang.

### **Proteksi Ekonomi**

Pemikiran merkantilisme tumbuh dan berkembang di Eropa Barat pada abad ke-16 s.d. 18. Pemikiran itu merepresentasikan suatu model nasionalisme ekonomi perdagangan yang dikenal dengan konsep *zero sum game*, dimana tujuan utama dari kebijakan politik itu adalah kemandirian/ swasembada, intervensionisme, dan proteksionisme (Sunoko et al, 2022). Proteksi menurut Fathun (2017) adalah bentuk kebijakan anti-pasar bebas yang dianggap tidak adil. Meskipun penerapan proteksi ekonomi sering mendapatkan cemoohan dari banyak pihak, ternyata menurut Anggraeni (2018) banyak negara maju yang melakukan proteksi dengan berbagai alasan. Indonesia sendiri telah membuat beberapa kebijakan sebagai bentuk tindakan proteksi ekonomi di beberapa aspek bisnis di beberapa wilayah (Silaban et al, 2022; Herdanta et al, 2021; Saifulloh, 2020; Sally, 2016; Priangani et al, 2021; Bachtiar, 2020; Syam, 2020).

### **Etnis Cina di Indonesia**

Dalam suatu negara sering kali terdapat berbagai kelompok etnis yang berbeda. Di Indonesia misalnya, kita mengenal ada etnis Jawa, Ambon, Madura, Cina, Minang, batak, dan sebagainya. Secara kuantitatif, etnis Cina merupakan minoritas ditengah kemajemukan etnis Indonesia. Sebagian besar etnis Cina di Jawa dan Madura berkegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dan industri perkotaan (Riyanti, 2013). Sebelum kedatangan orang Eropa khususnya bangsa Belanda di Nusantara, etnis Cina sudah melakukan aktivitas perdagangannya di tanah Jawa, tepatnya di pesisir pantai utara Jawa, khususnya di daerah Tuban dan Surabaya yang saat itu sudah ramai dikunjungi oleh para pedagang mancanegara yang kebanyakan dari mereka datang dari belahan bumi sebelah barat dan timur. Peran para pedagang Cina saat tersebut lebih spesifik sebagai pedagang perantara antara penguasa pribumi dengan penguasa pribumi, juga antara penguasa pribumi dengan rakyat (Jayusman, 2019).

Etnis Cina di Indonesia memiliki peranan dalam bidang ekonomi di berbagai wilayah (Winarni & Raharsono, 2018; Dewi, 2019; Mandasari & Nurini, 2013). Hal ini tidak dapat dipungkiri, melihat etnis cina memiliki

perilaku kewirausahaan yang membantu mereka dalam mencapai kesuksesan. Ciri-ciri perilaku tersebut antara lain tidak mudah putus asa, tidak melepas peluang, menepati janji, berusaha meyakinkan pembeliselama menjalankan urusan dagang dan memiliki daya tahan dan semangat juang yang tinggi (Rohmah et al, 2017).

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *mix method* dengan memadukan metode kualitatif dengan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan survei dengan angket. Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 160 orang yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan merujuk pada teori Roscoe (1975) yaitu jumlah sample yang dianggap mencukupi adalah 30-500 orang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

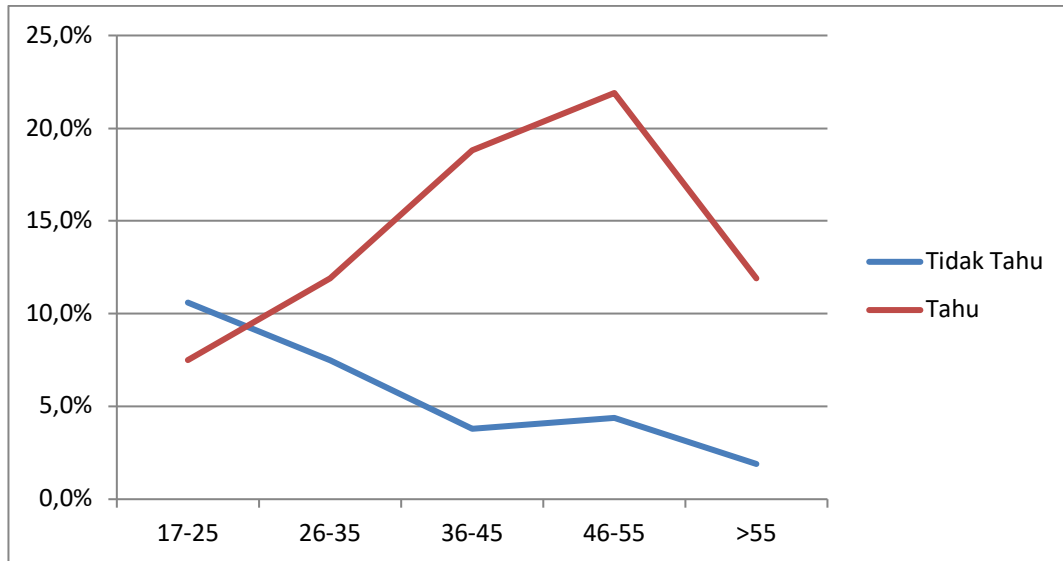
Sampang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Cilacap yang dikenal sebagai zona bisnis yang bebas WNI keturunan Cina. Namun demikian tidak semua warga mengetahui proteksi dagang yang telah lama berlaku di Kecamatan Sampang

Tabel 1. Pengetahuan tentang WNI keturunan Cina yang membuka usaha

No.	Tingkat Pengetahuan	Angka	Prosentase
1.	Tidak tahu	45 orang	28,1 %
2.	Tahu	115 orang	71,9 %
<b>TOTAL</b>		160 orang	100 %

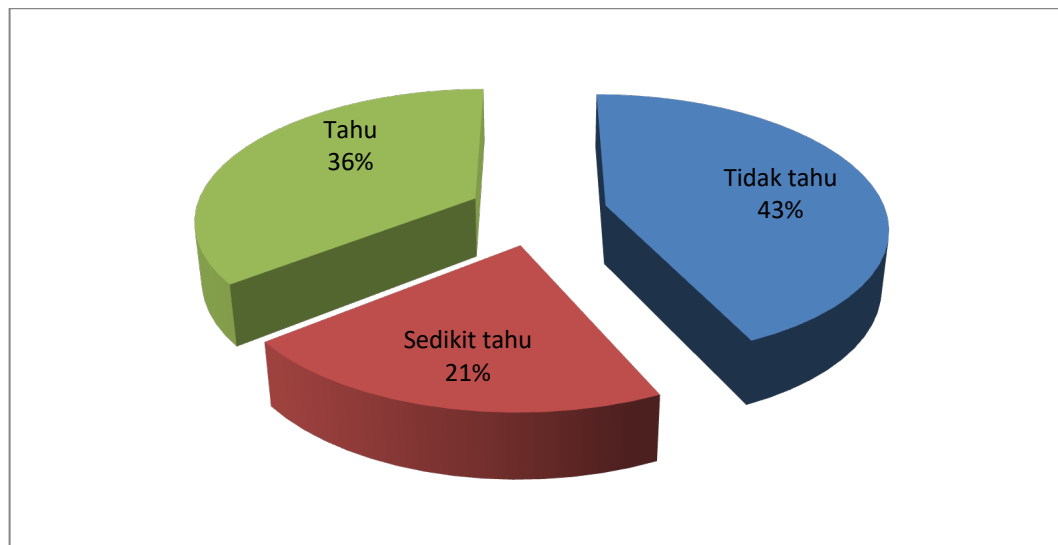
Tabel tersebut menyatakan bahwa mayoritas warga Sampang mengetahui bahwa tidak ada WNI keturunan Cina yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kecamatan Sampang. Pengetahuan tersebut diduga terkait dengan usia warga, dimana semakin tua semakin mengerti aturan proteksi dagang yang berlaku di Kecamatan Sampang.

Agus Darwanto 1, Dwi Lestari 2, & Okti Nurhidayah  
 Model of Sampang Market Economic Protection in Facing Chinese Trader  
 Monopoly with Collaborative Practices



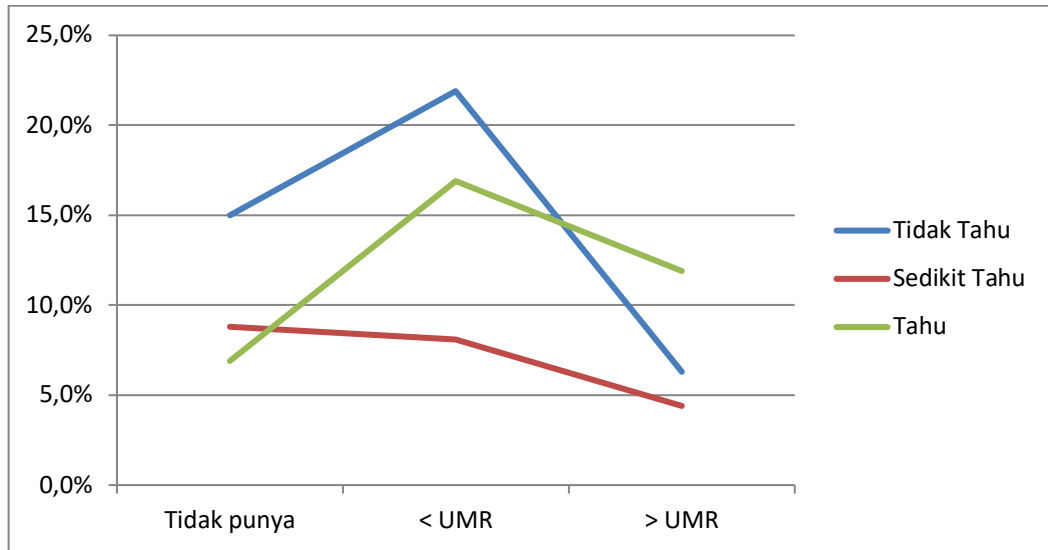
Gambar 1. Hubungan usia dengan tingkat pengetahuan

Gambar tersebut membuktikan bahwa semakin dewasa usia responden semakin mengetahui bahwa di kecamatan Sampang tidak ada WNI keturunan Cina yang menjalankan usaha / bisnis.



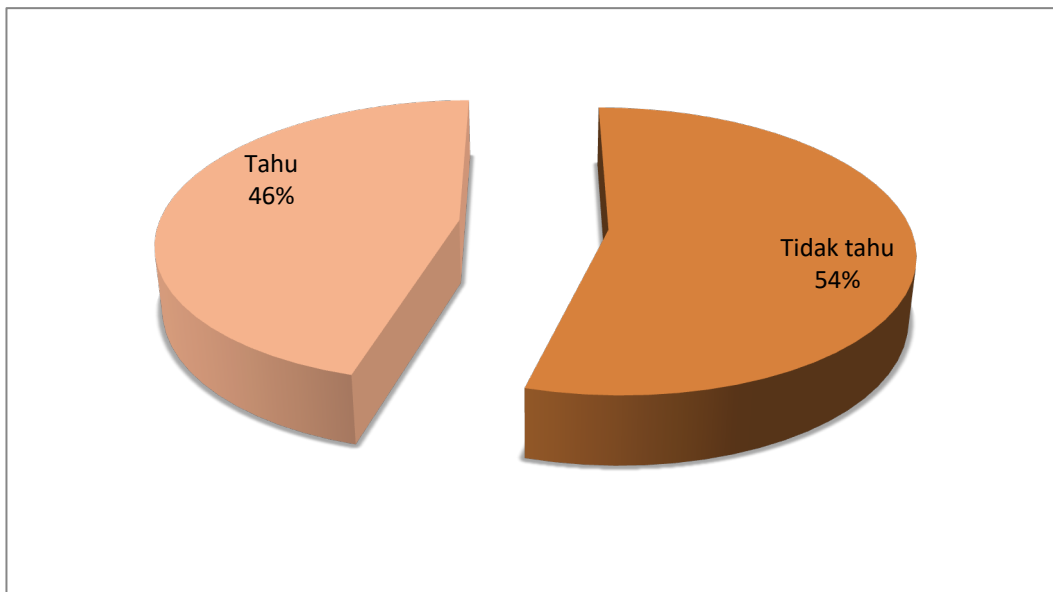
Gambar 2. Pengetahuan alasan WNI keturunan Cina tidak membuka bisnis

Gambar di atas menunjukkan tidak semua warga mengetahui alasan mengapa WNI keturunan Cina tidak menjalankan bisnis usahanya di Sampang. Penyebabnya diduga terkait dengan persaingan pasar yang mana warga semakin tinggi penghasilan semakin merasa terancam oleh praktik monopoli dagang yang biasa dilakukan WNI keturunan Cina.



Gambar 3. Hubungan penghasilan dengan pengetahuan alasan

Gambar tersebut membuktikan adanya kecenderungan semakin tinggi tingkat penghasilan responden semakin mengetahui alasan tidak adanya WNI keturunan Cina yang membuka usaha / bisnis di kecamatan Sampang.



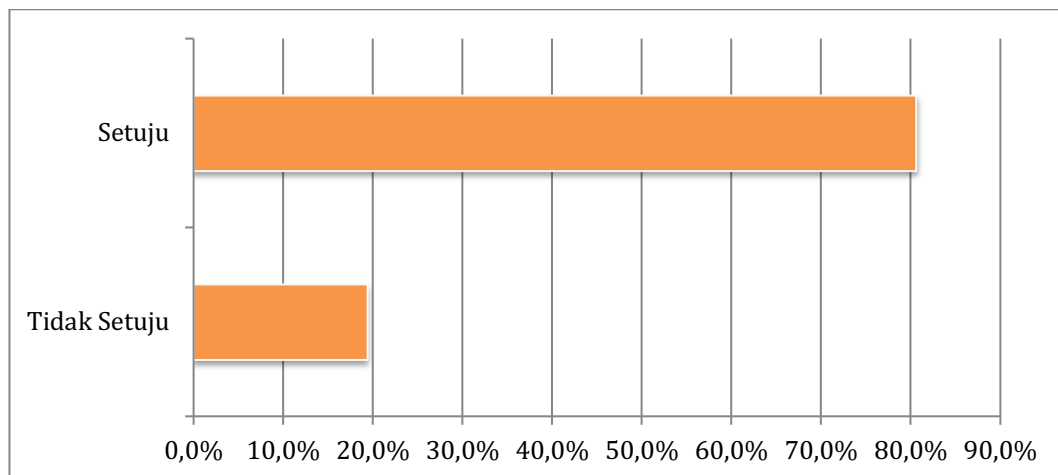
Gambar 4. Pengetahuan awal tidak adanya WNI Cina yang berbisnis

Mayoritas responden tidak mengetahui sejak kapan WNI keturunan Cina tidak membuka usaha / bisnis di kecamatan Sampang. Menurut Meikha, strategi proteksi dagang di Kecamatan Sampang sudah berlangsung sejak tahun 1964. Tujuannya menurut Kusman Munir adalah untuk melindungi para pedagang pribumi Sampang.

Dominasi warga keturunan Cina yang menguasai perdagangan di berbagai daerah di Indonesia mulai dari hulu ke hilir menjadi kekhawatiran tersendiri. Praktik ini menurut Darini (2011) kerap memicu terjadinya kecemburuan sosial di kalangan warga pribumi yang menyulut prasangka yang terus menerus hidup atau sengaja dihidupkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Bahkan muncul stigma bahwa warga keturunan Cina merupakan *economic animal* yang bersifat oportunistis, tidak memiliki loyalitas politik dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Stigma ini masih tertanam kuat dalam benak warga pribumi.

Menurut Pertiwi (2021) sentimen terhadap warga keturunan Cina sudah mengakar pada masyarakat peribumi sejak masa kolonialisme Belanda. Sentimen tersebut semakin menguat dengan terjadinya praktik diskriminatif dalam pengurusan regulasi pada era orde baru. Namun pasca tragedi Mei 1998 yang disusul dengan keruntuhan rezim orde baru, sentimen negatif terhadap warga keturunan Cina mulai berubah, tidak lagi beraroma etnis, agama, atau ras.

Demikian pula yang terjadi pada praktik proteksi dagang yang berlaku di Kecamatan Sampang. Ketidakhadiran peran aktif WNI keturunan Cina dalam perekonomian di kecamatan Sampang merupakan suatu fenomena yang cukup menarik untuk dikaji.

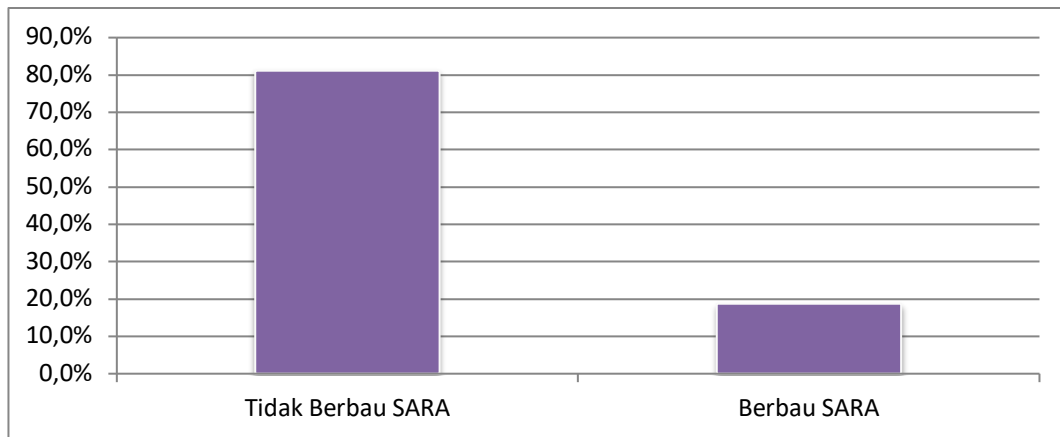


Gambar 5. Tingkat ketidaksetujuan terhadap peran aktif WNI Cina

Gambar di atas menunjukkan bahwa warga Sampang yang setuju dengan pelarangan WNI keturunan Cina berperan aktif dalam perekonomian di kecamatan Sampang masih sangat dominan. Hasil survei ini sejalan dengan pernyataan Sanwardi salah seorang sesepuh warga Sampang yang menyatakan adanya larangan warga keturunan Cina berjualan di

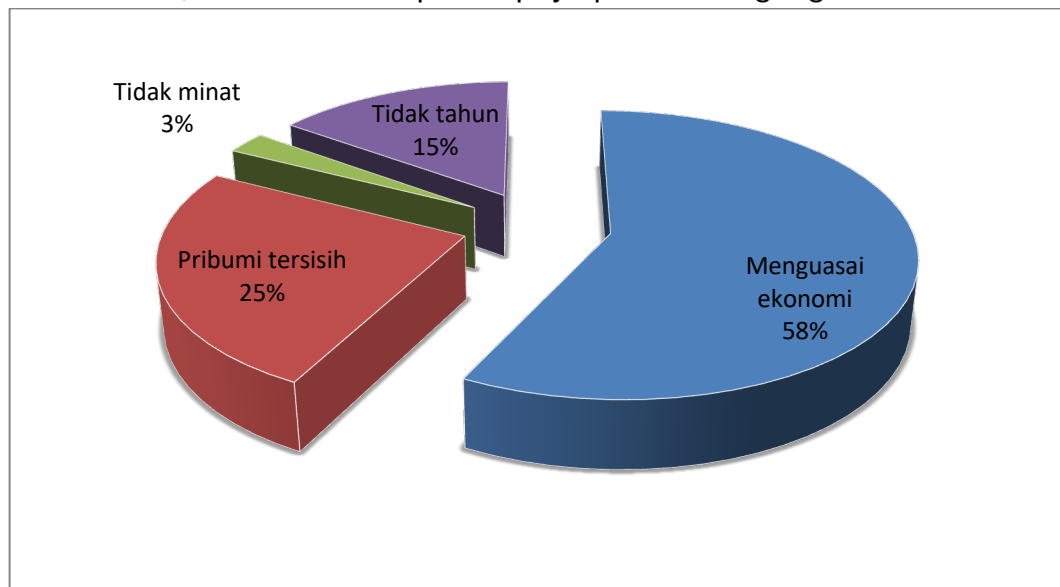
Pasar Sampang karena warga pribumi Sampang khawatir bila orang-orang dari etnis Cina akan memonopoli perekonomian di Pasar Sampang.

Senada dengan pernyataan Sanwardi, Sekretaris Desa Sampang Ombang Widodo menuturkan bahwa sebenarnya tidak ada larangan warga keturunan Cina untuk berdagang di Pasar Sampang. Hanya saja warga pribumi asli Sampang merasa khawatir terjadi praktik monopoli yang biasa dilakukan warga keturunan Cina di daerah lain sehingga diberlakukan proteksi dagang.



Gambar 6. Unsur SARA dalam ketidakadaan peran aktif WNI Cina

Mayoritas responden menyatakan bahwa alasan ketidaksetujuan mereka terhadap peran aktif WNI keturunan Cina di Sampang tidak mengandung unsur SARA, namun lebih kepada upaya proteksi dagang.

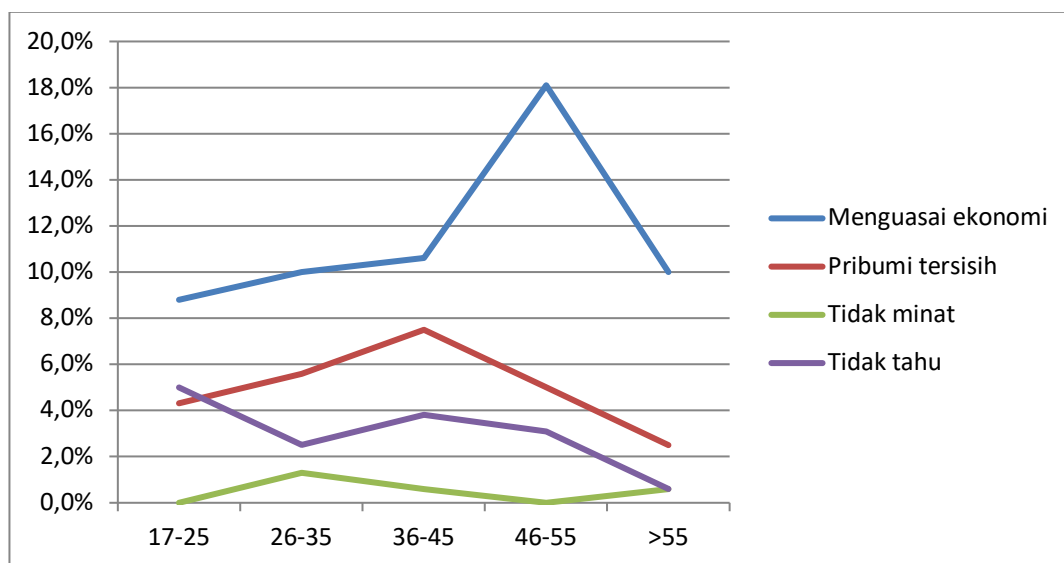


Gambar 7. Alasan penolakan peran aktif WNI keturunan Cina



Alasan yang paling dominan dari penolakan warga Sampang atas peran aktif WNI keturunan Cina adalah kekhawatiran WNI keturunan Cina akan menguasai perekonomian di kecamatan Sampang.

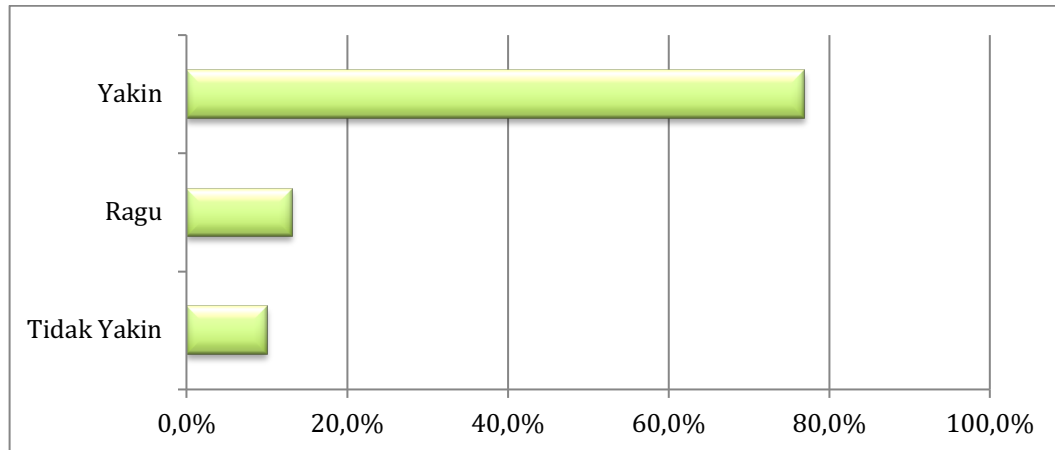
Menurut Said (2020) potensi konflik ekonomi memang membutuhkan sebuah kebijakan dan langkah bersama yang lebih strategis dan antisipatif. Diantaranya adalah kesepakatan untuk melakukan proteksi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sehingga isu proteksi menjadi relevan untuk diangkat kembali ke permukaan terutama pada era persaingan pasar bebas.



Gambar 8. Hubungan usia dengan alasan penolakan peran aktif WNI Cina

Mayoritas responden dari semua komposisi usia menolak peran aktif WNI keturunan Cina karena khawatir mereka akan menguasai perekonomian Sampang. Hasil survei tersebut senada dengan pernyataan para pedagang di Pasar Sampang, seperti Kusmiyati mendukung proteksi dagang karena khawatir terjadi monopoli ekonomi oleh warga keturunan Cina.

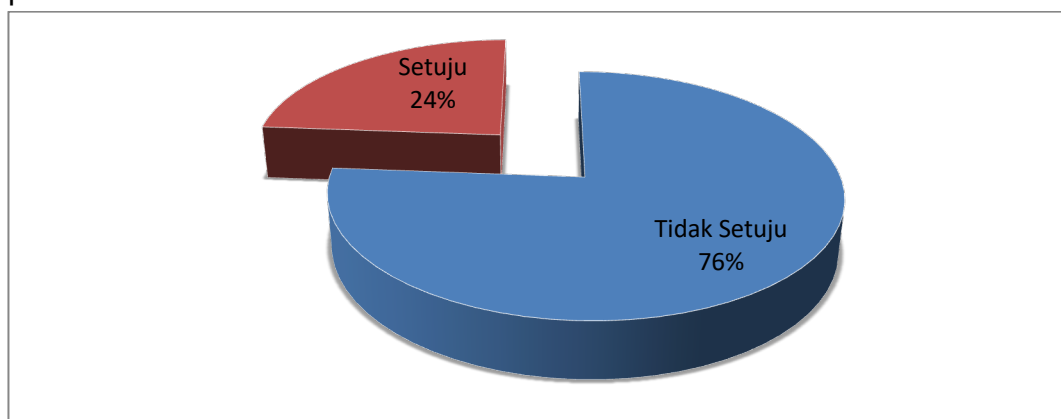
Kemajuan ekonomi suatu daerah umumnya tidak bisa terlepas dari peran warga keturunan Cina. Santoso *et al.* (2020) menuturkan bahwa warga keturuna Cina memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kota dan majunya perdagangan. Namun hal ini tidak berlaku untuk Kecamatan Sampang.



Gambar 9. Tingkat keyakinan warga Sampang memajukan perenominan

Mayoritas warga Sampang optimis bahwa perekonomian kecamatan Sampang akan maju meskipun tanpa keterlibatan aktif WNI keturunan Cina.

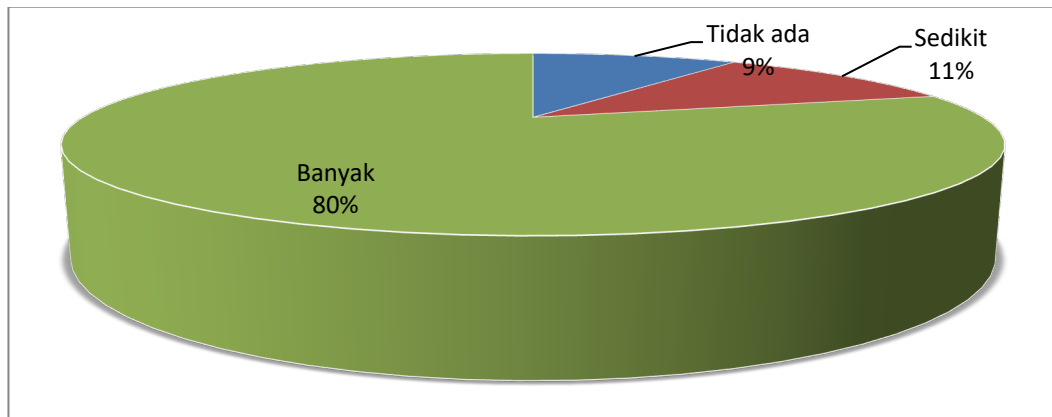
Meskipun proteksi dagang diterapkan oleh warga pribumi Sampang, namun tidak berarti mereka anticina. Sono salah satu pedagang pakaian di Pasar Sampang mengatakan memang tidak ada pedagang keturunan Cina di Pasar Sampang, tetapi hampir semua *supplier* barang dagangan adalah warga keturunan Cina. Sehingga proteksi perdagangan di Pasar Sampang tidak identik dengan sikap anticina. Sebagai solusinya adalah ditawarkan model kolaborasi antara warga keturunan Cina dengan warga pribumi namun usahanya tetap harus mengatasnamakan warga pribumi.



Gambar 10. Usaha WNI Cina mengatasnamakan warga pribumi

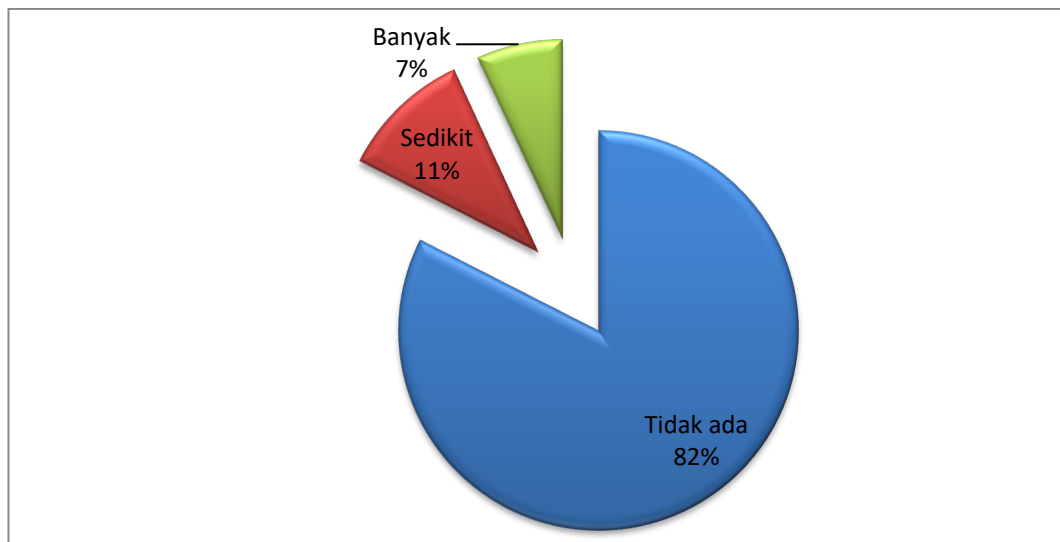
Berdasarkan hasil observasi memang dijumpai beberapa toko yang merupakan bentuk kolaborasi WNI keturunan Cina dengan warga pribumi menggunakan nama warga pribumi Sampang. Beberapa minimarket

modern yang *brand*-nya milik warga keturunan Cina berjajar di Pasar Sampang. Pengelolanya warga pribumi asli Sampang, tetapi pemilik *brand* minimarketnya adalah milik warga keturunan Cina. Meskipun demikian masih banyak responden yang cenderung menolaknya karena kekhawatiran terjadinya monopoli terselubung.



Gambar 11. Usaha warga pribumi yang tidak kolaborasi dengan WNI Cina

Responden menyatakan bahwa sebenarnya banyak warga pribumi Sampang yang berhasil mengembangkan usaha atau bisnisnya tanpa berkolaborasi dengan WNI keturunan Cina. Namun demikian usaha warga pribumi yang berkolaborasi dengan warga keturunan Cina pun tidak sedikit.



Gambar 12. Usaha warga pribumi yang berkolaborasi dengan WNI Cina

Berdasarkan grafik-grafik di atas tampak jelas ketegaran usaha warga pribumi Sampang meskipun tanpa keterlibatan WNI keturunan Cina,

namun demikian mereka tidak melarang bila ada warga keturunan Cina yang ingin berkolaborasi dengan warga pribumi dengan syarat usahanya tetap mengatasnamakan warga pribumi Sampang.

Hasil uji Anova menunjukkan signifikansi  $<0,05$  yang berarti terdapat pengaruh ketidaksetujuan atas keberadaan badan usaha milik WNI keturunan Cina di Sampang terhadap keyakinan majunya perekonomian kecamatan Sampang tanpa keterlibatan langsung WNI keturunan Cina.

## **KESIMPULAN**

Kecamatan Sampang merupakan satu-satunya daerah di Kabupaten Cilacap yang warga keturunan Cina tidak diperkenankan memiliki usaha sendiri untuk melindungi pedagang pribumi dari monopoli warga keturunan Cina. Ketidakterlibatan warga keturunan Cina dalam perekonomian Sampang sudah berjalan sejak tahun 1964, yaitu ketika warga Sampang berupaya memproteksi wilayahnya dari keterlibatan langsung warga keturunan Cina dalam kegiatan perekonomian. Warga Sampang membolehkan sistem kolaborasi bisnis antara warga keturunan Cina dengan warga pribumi namun menggunakan nama warga pribumi. Dengan strategi demikian, warga Sampang mampu mengembangkan perekonomian warga pribumi tanpa ketergantungan terhadap warga keturunan Cina.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggaeni, N. (2018). Sengketa Dan Proteksi Perdagangan Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Muamalatuna*, 10(1), 1-18.
- Arifin, S. (2017). Digitalisasi Pariwisata Madura. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 53-60.
- Darini, R. (2011). *Kebijakan Negara Dan Sentimen Anti-Cina: Perspektif Historis*. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negoisasi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 15-27. <https://doi.org/10.33541/Japs.V1i1.498>.
- Mujanah, S., Maqsudi, A., & Seputro, H. (2014). Penerapan teknologi tepat guna bagi kelompok usaha kecil jamu tradisional di Kecamatan Sampang Madura. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01).

- Pertiwi, M. (2021). Perkembangan Sentimen Anti-Tionghoa Di Indonesia. *Kaganga Komunika*, 3(1), 82-92. <https://doi.org/10.36761/Kagangakomunika.V3i1.1062>
- Said, T. Noer. (2020). Proteksi Untuk Kesejahteraan. *Kompetisi, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha* Edisi 25 Hal. 12 – 13.
- Santoso, R. E., Sari, S. R., Rukayah, R. S. (2020). Peran Masyarakat Tionghoa Terhadap Perkembangan Kawasan Heritage Di Kota Lasem, Kabupaten Rembang. *Modul*, 20(2), 84-97. <https://doi.org/10.14710/Mdl.20.2.2020.84-97>
- Sunoko, R., Saefuddin, A., Syarief, E., & Zulfainarni, N. (2022). Proteksionisme Dan Srandardisasi Garam Konsumsi Beryodium. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 101-111. <http://dx.doi.org/10.15578/Marina.V12i2.11077>
- Silaban, M. M., Sucipta, P. R., & Gunawan, D. (2022). Kebijakan Proteksionisme Pemerintah Indonesia Terhadap Minuman Beralkohol Di Tanjung Pinang. *Student Online Jurnal*, 3(1), 907-916.
- Hardenta, A. D., Arief, S. D., & Abyapta, W. R. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Lus Quia Lustum*, 30(1), 114-137. <https://doi.org/10.20885/lustum.Vol30.Iss1.Art6>
- Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional Dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V1i1.193>
- Sally, N. U. (2016). Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dauliyah (*Journal Of Islamic International Affairs*), 1(1).
- Riyanti, P. (2013). Relasi Sosial Pedagang Etnis Cina Dan Etnis Jawa Di Pasar Tradisional. *Jurnal Komunitas*, 5(1), 53-63.
- Jayusman, I. (2019). Peranan Orang Cina Dalam Perdagangan Di Jawa Pada Zaman Voc Abad Xvii. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(2), 1-10.
- Winarni, R., & Raharsono, L. S. (2018). Peran Ekonomi Etnis Cina Di Wilayah Eks Kota Administratif Jember Pada Zaman Orde Baru Dan Awal Reformasi. *Historia*, 1(1), 1-22.
- Rohmah, A. N., Widodo, J., & Djaja, S. (2017). Perilaku Wirausaha Pedagang Etnis Cina Di Jalan Samanhuji Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 8-15.
- Dewi, W. S. (2019). Aktivitas Perdagangan Etnis Tionghoa Di Pontianak Tahun 1819-1942. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 4(3), 354-368.

- Mandasari, F., & Nurini. (2013). Analisis Karakter Kampung Pecinan Di Kawasan Perdagangan Dan Jasa Peunayong Pusat Kota Banda Aceh. *Jurnal Ruang*, 1(1), 21-30.
- Priangani, A., Mansyur, M., & Soeari, E. K. (2021). Pandemi Covid 19 Dan Menguatnya Proteksionisme. In *Senaspolhi 3*, (Pp. 1-11).
- Bachtiar, F. R. (2020). Peran Wto Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia). *Review Of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/Rir.V2i1.15422>
- Syam, A. W. A. (2020). Dampak Kebijakan Proteksi Indonesia Pada Bidang Waralaba Asing (Studi Kasus: Kentucky Fried Chicken). *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 23-37.